

# Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai)

Ferdi Irawan<sup>1</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
ferdiirawan@student.uir.ac.id

Received : February 8, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

## Abstract

*The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of the duties of the Pekanbaru City Women's and Children's Empowerment Service in Handling Domestic Violence (Case Study of Marpoyan Damai District). The research method used is a qualitative method. The theory used is Implementation theory with specified indicators, namely: Communication, Resource Disposition and Bureaucratic Structure. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive. Results of research on the Implementation of the Tasks of the Pekanbaru City Women's and Children's Empowerment Service in Handling Domestic Violence (Case Study of Marpoyan Damai District. Implemented through the socialization of policies and programs for prevention and early detection of risk factors. Early detection of domestic violence risk factors is a step to early discovery of factors which are potentially dangerous and can trigger acts of violence against certain individuals or groups. Through this effort, it is hoped that it will be able to prevent acts of domestic violence and prevent repeat acts from occurring.*

**KeyWords : Implementation, Duties, and Women Empowerment**

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori Pelaksanaan dengan indikator yang ditetapkan yakni: Komunikasi, Sumber Daya Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah untuk menemukan secara dini faktor-faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang atau kelompok tertentu. Melalui upaya ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan mencegah agar tidak terjadi tindak berulang.

**Key Words : Pelaksanaan, Tugas, dan Pemberdayaan perempuan**

## Pendahuluan

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender, memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat. KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlandung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlandung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis rumah tangga yang mayoritas dialami perempuan baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak salah satunya Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

#### 1. Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.

Berdasarkan Renstra Hal. 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Meningkatkan perlindungan hak perempuan
2. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak
4. Meningkatkan perlindungan khusus Anak

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris,
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga,
6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat,
7. Unit Pelaksana Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, ketidakserasian, ketidak transparan, ketidak lancar dan ketidak tepatan dalam pelayanan, penanganan pengaduan korban tindak kekerasan. Berikut Kasus Kekerasan dengan Perempuan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

#### **Kasus Kekerasan dengan perempuan sebagai korban Bulan Januari-Desember**

**Tahun 2022 Di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	2	3
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	40
2	Kekerasan Berbasis Gender	31
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Pekanbaru, kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dalam kekerasan tersebut KDRT dan berbasis gender, Rekap Kasus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Rekap Kasus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jenis Kasus	Jumlah
1	2	3	4
1	Marpoyan Damai	KDRT	10
2	Rumbai Timur	KDRT	2
3	Rumbai	KDRT	4
4	Bina Widya	KDRT	2
5	Bukit Raya	KDRT	5
6	Lima Puluh	KDRT	3
7	Senapelan	KDRT	2
8	Tuah madani	KDRT	2
9	Sail	KDRT	1
10	Tenayan Raya	KDRT	2
11	Kulim	KDRT	1
12	Pekanbaru Kota	KDRT	1
13	Payung Sekaki	KDRT	2
14	Sukajadi	KDRT	1
15	Luar Kota	KDRT	2
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, 2024*

Berdasarkan Tabel diatas bisa dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada tahun 2022 terbanyak di Kecamatan Marpoyan Damai dengan jumlah kekerasan 10 yang terjadi selama tahun 2022. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan memaparkan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai).

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Administrasi**

Berdasarkan Penelitian diatas Ranny Rahmawati memberikan pelatihan-pelatihan kepada korban KDRT guna meningkatkan keahlian atau kemampuan mereka dalam bidang tata boga, tata rias dan menjahit. Tujuan penelitian ini yaitu mampu menjelaskan pemberdayaan perempuan korban KDRT. Persamaan penelitian dengan penulis, menjelaskan Tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan (Rahmawati, 2018).

Penelitian Regina Pratiwi, Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Persamaan dengan penelitian dengan penulis, menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan (Pratiwi, 2016)

Penelitian Dila Antar, implementasi kebijakan program sosial oleh Keluarga Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) dalam penanganan kasus KDRT di Lubuk Alung, Padang Kabupaten Pariaman, Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, Persamaan dengan penelitian penulis pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan perempuan (Dila, 2020).

Penelitian Astrella Janice, penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam pembangunan desa di desa Tanjung lapang sudah berjalan cukup baik ini dibuktikan dengan beberapa program kerja dari BPMD yang terealisasi ini tak lepas dari peran BPMD, Persamaan dengan penelitian penulis untuk mengetahui pelaksanaan tugas instansi yang menangani pemberdayaan perempuan (Astrella, 2015).

Penelitian Ikram, Muhammad, hasil penelitian ditemukan permasalahan seperti rendahnya anggaran, tidak adanya peraturan daerah, tidak adanya fasilitas rumah aman, tidak maksimal dalam melayani pelapor karena harus dijadwalkan terlebih dahulu, Persamaan dengan penelitian penulis, penanganan Pemberdayaan perempuan (Ikram, 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas merupakan hasil tinjauan pustaka peneliti terkait Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, khususnya dalam studi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan.

### **Metode**

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan Informan dan Key Informan. Selain itu Pengambilan Informan untuk Korban KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai menggunakan Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2017) Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Subjek dan objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi dalam penelitian ini 3 Korban KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai dijadikan Informan sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai Key Informan dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan adalah semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik atau privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan. Edward III (dalam Widodo 2010:98) Berikut Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) menurut kesimpulan diatas dipengaruhi 4 Variabel, Yakni :

#### **1.Komunikasi**

Komunikasi, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik, Item dalam penelitian Koordinasi Komunikasi dan Sumber Informasi. Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) salah satu yang dianalisis adalah Komunikasi. Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan Indikator Komunikasi, Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dijadikan rujukan dalam pelayanan terhadap korban kekerasan termasuk KDRT Informasi yang didapat dari aduan langsung dari korban KDRT, media sosial dan lain-lain.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan Indikator Komunikasi. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

## **2. Sumber Daya**

Sumber Daya, mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan Item Penilaian Dana dan SDM. Dalam penelitian ini Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) salah satu yang dianalisis adalah Sumber Daya Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan Indikator Sumber Daya, Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kota telah Meningkatkan Sumber Daya Dana maupun Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan Indikator Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan Hasil Observasi dan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan

Indikator Sumber Daya Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kota telah Meningkatkan Sumber Daya Dana maupun Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Daya Manusia perlu ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hasil dari Indikator Sumber Daya dapat disimpulkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan, peningkatan sumber daya finansial dan manusia dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pegawai UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mengungkapkan bahwa peningkatan sumber daya finansial dan manusia untuk mengendalikan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui kebijakan dan strategi yang selaras dengan kebijakan sektor lainnya. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum, juga diperlukan. Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa pendanaan dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk korban tindakan apa pun yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pemerintah Kota telah meningkatkan sumber daya finansial dan manusia untuk memperbaiki kebijakan mengenai pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu ditingkatkan sumber daya manusia bagi para korban tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis atau fisik, dan/atau penelantaran rumah tangga.

### **3. Disposisi**

Disposisi, Pengertian disposisi dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan Item penilaian Pemahaman pendalaman kebijakan dan instansi terhadap kebijakan. Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan Indikator Disposisi, Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah untuk menemukan secara dini faktor-faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang atau kelompok tertentu. Melalui upaya



ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan mencegah agar tidak terjadi tindak berulang.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan Indikator Disposisi Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan Indikator Disposisi Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah untuk menemukan secara dini faktor-faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang atau kelompok tertentu. Melalui upaya ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan mencegah agar tidak terjadi tindak berulang Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hasil dari Indikator Disposisi dapat disimpulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mengungkap aktivitas mereka dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini melibatkan pemberdayaan perempuan korban melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan berulang. Pegawai UPT Perlindungan Perempuan dan Anak serta pegawai sektor perlindungan perempuan dan anak memberikan wawasan lebih jauh. Deteksi dini terhadap faktor risiko memerlukan keselarasan dengan kebijakan sektor lain, pemahaman dan dukungan masyarakat, serta layanan yang komprehensif. Hal ini melibatkan kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum. Korban KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai mengungkapkan kurangnya kesadaran mengenai risikonya. Kebijakan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan korban, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, dan ancaman atau paksaan dalam rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam Penanganan KDRT (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) menegaskan perlunya perbaikan kebijakan KDRT terhadap korban.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi adalah pengaturan dan pengorganisasian Prosedur-prosedur Kerja Standar, Item Penilaian Pelayanan Kepada masyarakat dan Standar

Operasional Pelayanan. Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi, Dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku melalui semacam restorasi justice (RJ) atau perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum di pengadilan. Diharapkan aparat Kelurahan Kota Pekanbaru yang menjadi ujung tombak dapat menangani permasalahan sebelum secara normatif kasusnya dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi yang tidak diketahui oleh Masyarakat Kota Pekanbaru dalam Resiko Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan dan SOP yang ada perlu dijalankan, sehingga korban KDRT bisa menyelesaikan dengan cepat permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi Dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku melalui semacam restorasi justice (RJ) atau perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum di pengadilan. Diharapkan aparat Kelurahan Kota Pekanbaru yang menjadi ujung tombak dapat menangani permasalahan sebelum secara normatif kasusnya dilaporkan kepada aparat kepolisian. Struktur Birokrasi yang tidak diketahui oleh Masyarakat Kota Pekanbaru dalam Resiko Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan dan SOP yang ada perlu dijalankan, sehingga korban KDRT bisa menyelesaikan dengan cepat permasalahan yang terjadi.

Hasil dari Indikator Struktur Birokrasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat ini menyatakan, struktur birokrasi penanganan KDRT melibatkan pemberdayaan perempuan korban melalui restorasi justice (RJ) sebelum masuk ke ranah hukum. Harapannya, aparat desa dapat mengatasi masalah ini sebelum dilaporkan secara normatif ke polisi. UPT perlindungan perempuan dan anak juga mempunyai pandangan serupa. Mereka menekankan pentingnya mengikuti SOP dan RJ yang berlaku dalam penanganan kasus KDRT. Korban KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai melaporkan kurangnya kesadaran terhadap struktur birokrasi yang ada. Mereka percaya bahwa kebijakan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperbaiki dan SOP yang ada harus diterapkan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Struktur birokrasi penanganan KDRT dilakukan sesuai SOP dan RJ sebelum masuk ke ranah hukum. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap struktur ini membuat mereka berisiko mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun terdapat prosedur penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru, terdapat kebutuhan untuk memperbaiki kebijakan dan

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memastikan para korban dapat menyelesaikan masalahnya dengan cepat.

Berdasarkan Pembahasan Implementasi, dapat disimpulkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menyatakan pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pejabat di bidang perlindungan perempuan dan anak menekankan perlunya kolaborasi dan kemitraan antar pihak terkait untuk memberikan layanan yang komprehensif. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan terpadu.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berikut Uraian Kesimpulan Berdasarkan Indikator :

1. Indikator Komunikasi tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dijadikan rujukan dalam pelayanan terhadap korban kekerasan termasuk KDRT
2. Indikator Sumber Daya Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kota telah Meningkatkan Sumber Daya Dana maupun Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Indikator Disposisi, Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah untuk menemukan secara dini faktor-faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang atau kelompok tertentu. Melalui

upaya ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan mencegah agar tidak terjadi tindak berulang

4. Indikator Struktur Birokrasi tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai, Dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku melalui semacam restorasi justice (RJ) atau perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum di pengadilan. Diharapkan aparat Kelurahan Kota Pekanbaru yang menjadi ujung tombak dapat menangani permasalahan sebelum secara normatif kasusnya dilaporkan kepada aparat kepolisian

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku dan Jurnal:**

- Afandi, P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried, dan Baharuddin, 2014. Ilmu Administrasi, Makassar, PT Refika Aditama
- Ali, Zaini dan Raden Imam. 2015. Teori Kebijakan Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Aggara, Sahya. 2017. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia
- Artikel Pendidikan.id. (2021). Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli. Diakses pada 6 Agustus 2021, dari <https://artikelpendidikan.id/pengertian-administrasi-menurut-para-ahli/>
- Creswell, John. W. 2014. Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand Oaks, Sage.
- Effendi, Usman, 2014. Asas Manajemen, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Guru Rizal. (2021). Organisasi Adalah. Diakses pada 6 Agustus 2021, dari <https://kabarkan.com/organisasi-adalah/>
- Hamim, Sufian, 2005. Administrasi, Organisasi, Manajemen, Pekanbaru, UIR Press.
- Hamim, Sufian dan Wiwik Suryadartiwi. 2022. Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial. Purbalingga. CV.Eureka Media Aksara
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.

- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). **PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN**

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.

- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).

- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2),



88-99.

- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus:

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.

- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD: "Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International*

*Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.

- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota. Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Karsadi. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kencana, Syafii, Inu, 2015. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Bandung, Sinar Grafika Offset.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Mooney, D. James. 2006. Konsep Pengembangan Organisasi Publik. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Nawawi, Hadari, 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant D, 2004. Kebijakan Publik Formulasi. Jakarta, PT. Elekmedia Komputindo Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Nurman. 2023. Teori Administrasi Administrative Executif. Sleman. Deppublish
- Rachmat dan Dadang Gunawan. 2016. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia
- Rahadi, Dedi Rianto. 2020. Konsep Penelitian Kualitatif Plus Tutorial NVivo. Tasikmalaya: Filda Fikrindo
- Sedarmayanti. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2016. Teori Pengembang Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujaweni. Wiratna. 2023. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Di Pahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Penerbit Alfabet.
- Sugiyono, 2022. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Penerbit Alfabet.
- Syafri, Wirman, 2012. Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Syahrudin. 2020. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media

- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Tranformasi Pikiran Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset
- Tresiana Novita, Duadji Noverman. 2019. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Thoha, Miftah, 2017. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Prenada Media Group.
- Tim Penyusun, 2013. Buku Pedoman Penulisan, Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Yuliansyah. Hakim, Hanna Marthatya. Suryani, Ani Wilujeng. 2015. Manajemen dan Analisis Data Kualitatif dengan Perangkat Lunak NVivo. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf, Muri 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana
- Zulkifli. 2008. Fungsi-fungsi Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.

**Regulasi:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat